

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Penetapan Audit Fee

Jasa audit mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat oleh manajemen entitas. Akuntan publik yang memberikan jasa audit disebut dengan istilah auditor. Auditor yang melaksanakan audit atas laporan keuangan historis disebut dengan auditor independen [4].

Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Profesi auditor independen memperoleh honorarium dari kliennya dalam menjalankan kehaliannya, namun auditor independen harus independen, tidak memihak kepada kliennya. Independensi auditor dalam melaksanakan kehaliannya merupakan hal yang pokok, meskipun auditor tersebut dibayar oleh kliennya karena jasa yang diberikan tersebut [4].

Tanggung jawab auditor kepada klien salah satunya adalah mengenai fee profesional, yang dimana fee profesional ini dapat terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Besaran fee

Besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung antara lain: resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperbolehkan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.

b. Fee kontinjen

Fee kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tersebut. Fee dianggap tidak kontinjen jika

ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengaturatau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.

Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi [4]. Penetapan Audit Fee diprosikan dengan Logaritma Natural dari *Professional Fee*. Rumusnya adalah

$$\text{Penetapan Audit Fee} = \text{Ln}(\text{Professional Fee}). \quad (2.1)$$

2.1.2. Tipe Kepemilikan Perusahaan

Tipe kepemilikan perusahaan menentukan besarnya Audit *Fee* yang dikeluarkan. Tipe kepemilikan perusahaan dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN dengan perusahaan swasta atau non-BUMN. Apabila tipe kepemilikan perusahaan adalah perusahaan BUMN maka audit fee yang dibayarkan akan rendah dan apabila perusahaan swasta atau non-BUMN audit fee yang akan dibayarkan akan tinggi.

1. Perusahaan BUMN

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kemudian dijadikan modal BUMN.

a. BUMN berbentuk Persero

BUMN yang berbentuk Persero adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas yang bertujuan mencari keuntungan. Modal persero berupa saham yang seluruhnya atau paling tidak setengah dari saham tersebut dimiliki oleh negara.

b. BUMN berbentuk Persero Terbuka

BUMN yang berbentuk Perusahaan Perseroan Terbuka adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan pasar modal.

c. BUMN berbentuk Perusahaan Umum

BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang modalnya tidak berupa saham dan seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Perum lebih bertujuan untuk menyediakan barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat meskipun tetap berusaha mencari keuntungan.

2. Perusahaan Non-BUMN

Perusahaan Non-BUMN atau perusahaan swasta adalah badan usaha yang modalnya merupakan milik swasta baik perorangan maupun sekelompok orang. Jika modal BUMN dimiliki oleh pemerintah, modal swasta berasal dari perorangan atau sekelompok orang yang bersepakat mendirikan suatu usaha. Perusahaan swasta merupakan pelaku perekonomian Indonesia menunjukkan salah satu ciri ekonomi Pancasila yang tidak menginginkan peranan pemerintah yang terlalu besar. Pemberian peluang kepada perusahaan swasta juga akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam perekonomian Indonesia [7]. Dalam penelitian ini, tipe kepemilikan diprosikan dengan variabel dummy, dimana angka 1 untuk perusahaan BUMN dan angka 0 untuk perusahaan non-BUMN.

2.1.3. Ukuran Perusahaan

Dari sudut pandang manajemen strategis, terdapat masalah yang dapat timbul karena hubungan keagenan antara pemegang saham dengan eksekutif perusahaan, yaitu eksekutif lebih mengutamakan pertumbuhan ukuran perusahaan daripada laba. Pemegang saham pada umumnya ingin memaksimalkan laba, karena pertumbuhan laba akan menghasilkan apresiasi terhadap harga saham. Namun, karena manajer biasanya diberikan kompensasi yang lebih tinggi untuk kenaikan dalam ukuran perusahaan dibandingkan dengan pertumbuhan laba, maka mereka mungkin merekomendasikan strategi yang menghasilkan pertumbuhan perusahaan, seperti merger dan akuisisi. Selain itu, status manajer dalam komunitas bisnis sering kali dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Manajer mendapatkan kehormatan dari mengarahkan pertumbuhan organisasi, dan mereka memperoleh manfaat dalam bentuk kemajuan karier dan mobilitas pekerjaan yang dikaitkan dengan peningkatan dalam ukuran perusahaan [8].

Aset Total dapat menggambarkan ukuran perusahaan. Semakin besar aset biasanya perusahaan tersebut semakin besar. Jadi ukuran perusahaan yang diwakili aset total biasanya mempengaruhi semakin besarnya utang dalam mata uang asing [9]. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diprosikan dengan Logaritma Natural dari Total Aset. Rumusnya adalah

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{Total Aset}) \quad (2.2)$$

2.1.4. Anak Perusahaan

Salah satu cara pengembangan perusahaan yang sangat sederhana adalah dengan mendirikan perusahaan baru sebagai anak perusahaan. Visi, misi dan strategi ditetapkan agar kelak perusahaan dapat meraih tujuan seperti yang ditetapkan. Strategi bisnis yang didesain untuk anak perusahaan harus diselaraskan dengan strategi pada perusahaan induk. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendirian anak perusahaan adalah : persiapan dan penyusunan rencana bisnis (business plan) anak perusahaan yang di beberapa perusahaan ada yang membuatnya secara sistematis dan rinci tetapi di beberapa perusahaan hanya memuat garis besarnya saja; penyusunan anggaran dasar anak perusahaan yang dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku; penentuan modal dasar dan modal disetor perusahaan; penunjukan pengurus anak perusahaan yaitu komisaris dan direksi [10].

Perseroan yang dikuasai disebut anak perusahaan, sedangkan yang menguasainya dinamakan induk perusahaan. Sekalipun suatu anak perusahaan sepenuhnya dikuasai oleh induk perusahaan, namun secara hukum kedua perusahaan adalah badan yang terpisah. Dengan demikian, masing-masing perusahaan bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan prinsip akuntansi indonesia, bila ada induk perusahaan mempunyai satu atau lebih anak perusahaan maka diperlukan penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk mengungkapkan secara jelas posisi keuangan dan hasil usaha anak perusahaan dan induk perusahaan sebagai satu kesatuan [11]. Dalam penelitian ini, anak perusahaan diprosikan dengan variabel dummy, dimana angka 1

untuk perusahaan yang memiliki anak perusahaan dan angka 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan.

2.1.5. Ukuran KAP

Terdapat beberapa tanggung jawab dari akuntan publik dalam menjalankan tugasnya, tetapi yang paling penting untuk dijaga dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh akuntan publik adalah :

- a. Tanggung jawab atas kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam tugasnya.
- b. Tanggung jawab atas mutu pekerjaan atau pelaksanaan tugasnya [12].

Jika akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan audit melakukan kelalaian dan mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga yang mendasari opini dari akuntan publik tersebut, maka akuntan publik dapat digugat secara hukum perdata jika kelalaiannya dapat dibuktikan. Di dunia, terdapat empat KAP yang paling berpengaruh dan terkenal, yang jasanya paling banyak digunakan oleh klien. Empat KAP itu dikenal dengan sebutan *The Big Four Auditors*. Kantor akuntan *The Big Four* merupakan kantor akuntan internasional terbesar di dunia yaitu :

- a. PricewaterhouseCoopers (PwC)
- b. Deloitte Touche Tohmatsu (DTT)
- c. Ernst & Young (E&Y)
- d. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)

Kalau ditelusuri, sejarah keempat kantor akuntan terbesar tersebut berasal dari Eropa, yang sampai saat ini terbentuk dari serangkaian panjang penggabungan usaha. PricewaterhouseCoopers dan Deloitte Touche Tohmatsu didirikan di Inggris, Ernst & Young didirikan oleh seorang akuntan dari Skotlandia, KPMG merupakan produk gabungan dari dua kantor besar dari Belgia dan Belanda. Namun karena pengaruh ekonomi Amerika Serikat yang dulu sempat sangat dominan (sebelum krisis ekonomi dunia di tahun 2008), kantor-kantor cabang *The Big Four* yang berlokasi di Amerika Serikat selalu berhasil memperoleh penghasilan yang lebih besar dibanding dengan gabungan kantor-kantor cabangnya di seluruh dunia [12]. Dalam penelitian ini, Ukuran

KAP diproksikan dengan variabel dummy, dimana angka 1 untuk KAP *Big Four* dan angka 0 untuk KAP *Non-Big Four*.

2.1.6. Internal Auditor

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu: Keandalan pelaporan keuangan, Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, Efektivitas dan efisiensi operasi. Tujuan pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan adalah “keandalan pelaporan keuangan” [4].

Audit intern memberikan bantuan besar bagi auditor dalam audit atas laporan keuangan. SA Seksi 322 *Pertimbangan Auditor atas Fungsi Audit Intern dalam Audit atas Laporan Keuangan* memberikan panduan bagi auditor independen dalam mempertimbangkan pekerjaan auditor intern dan dalam menggunakan pekerjaan auditor intern untuk membantu pelaksanaan audit atas laporan keuangan klien. Fungsi audit intern merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Tanggung jawab penting fungsi audit intern adalah memantau kinerja pengendalian intern entitas. Pada waktu auditor berusaha memahami pengendalian intern, ia harus berusaha memahami fungsi audit intern untuk mengidentifikasi aktivitas audit intern yang relevan dengan perencanaan audit [4]. Dalam penelitian ini, internal audit diproksikan dengan variabel dummy, dimana angka 1 untuk perusahaan yang memiliki internal audit dan angka 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki internal audit.

2.1.7. Komite Audit

Komite Audit bertugas membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit dan eksternal audit. Anggota komite audit sekurang-kurangnya tiga orang yang diangkat dan diberhentikan komisaris,

sedangkan anggota komite audit dari komisaris bertindak sebagai ketua. Komite audit memiliki fungsi dalam hal-hal yang terkait dengan proses dan peran audit bagi perusahaan, terutama dalam pelaporan hasil audit keuangan perusahaan yang dipaparkan untuk publik. Komite audit harus bersikap adil dalam pengambilan keputusan. Hal ini ditujukan kepada semua pihak terutama dalam penelahaan terhadap kesalahan asumsi ataupun pelanggaran terhadap resolusi direksi. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektivitas fungsi internal audit (SPI) ataupun eksternal audit [5].

Dalam perusahaan, tugas dan tanggung jawab komite audit adalah memahami pokok-pokok laporan keuangan, mengidentifikasi area yang dianggap sensitif dan rawan terhadap resiko serta pemahaman terhadap risk management dan sistem internal control yang berlaku di perusahaan tersebut [5]. Dalam penelitian ini, Komite audit diprosikan dengan jumlah anggota komite audit yang juga merupakan anggota komisaris independen.

2.1.8. Kompensasi CEO

Kompensasi adalah imbalan yang diberikan perusahaan kepada individu sebagai balas jasa atas kesediaan mereka untuk melakukan berbagai pekerjaan dan tugas organisasi. Sistem kompensasi yang diberikan merupakan faktor utama dalam mempertahankan tenaga-tenaga terampil yang ada di perusahaan. Bagian terpenting dari sistem kompensasi adalah upah dan gaji, di samping intensif dan tunjangan karyawan. Upah dan gaji adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan atas tenaga mereka. Upah (*wage*) adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan berdasarkan nilai pembayaran per jam atau sejumlah output yang dihasilkan. Buruh pabrik tekstil, pabrik sepatu, atau pekerja lepas biasanya menerima pembayaran dalam bentuk upah. Gaji (*salary*) adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan secara periodik, seperti per bulan atau per tahun karena seseorang melaksanakan

tanggung jawab pekerjaan. Staff kantor, eksekutif, dan karyawan profesional biasanya menerima pembayaran dalam bentuk gaji. Sistem kompensasi yang baik dapat menarik karyawan yang memiliki kualifikasi yang baik, menjadikan karyawan loyal, puas dengan pekerjaannya, dan menginspirasi mereka untuk lebih berprestasi [6].

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian kompensasi adalah :

- a. kompensasi harus dapat memenuhi kebutuhan minimal;
- b. kompensasi harus meningkat;
- c. kompensasi harus dapat menimbulkan semangat kerja;
- d. kompensasi harus adil;
- e. kompensasi tidak boleh bersifat statis;
- f. komposisi dari kompensasi yang diberikan harus diperhatikan [13].

Dalam penelitian ini, Kompensasi CEO diprosikan dengan logaritma natural dari imbalan jangka pendek yang diberikan kepada dewan direksi dan dewan komisaris.

$$\text{Kompensasi CEO} = \text{Ln} (\text{Imbalan Jangka Pendek}) \quad (2.3)$$

2.1.9. Manajemen Laba

Amar, Oriol, dan Gowthorpe (2004), mendefinisikan creative accounting merupakan transformasi informasi keuangan dengan menggunakan pilihan metode, estimasi, dan praktik akuntansi yang diperbolehkan oleh standar akuntansi. Myddelton (2009) menyatakan bahwa akuntan yang dianggap kreatif adalah akuntan yang menginterpretasikan area abu-abu untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan dari hasil interpretasi tersebut. Creative accounting adalah aktivitas badan usaha untuk memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi guna mendapatkan hasil yang diinginkan [14]. Secara umum, perusahaan yang bukan perusahaan *go public* cenderung menyajikan nilai laba fiskal yang lebih rendah dari yang sebenarnya dalam laporan pajak agar biaya pajaknya lebih rendah. Sementara, perusahaan *go public* cenderung menaikkan laba karena mereka lebih mementingkan kenaikan harga sahamnya dibandingkan pertimbangan pajak [14].

Penyisihan penilaian adalah sarana yang populer bagi anajemen laba. Analisis seharusnya dengan hati-hati melihat setiap perubahan khususnya penurunan penyisihan penilaian, karena hal tersebut bisa jadi merupakan usaha untuk melakukan manajemen laba. Umumnya, banyak analisis membandingkan laba GAAP dan laba kena pajak untuk mengevaluasi kualitas laba. Adanya kewajiban aset pajak tangguhan dalam jumlah besar menunjukkan laba GAAP di masa lalu lebih tinggi (lebih rendah) daripada laba kena pajak. Karenanya perusahaan dengan kewajiban aset pajak tangguhan yang tinggi memiliki kemungkinan akan menerapkan praktik akuntansi yang agresif (konservatif) [15].

Cara Perhitungan Manajemen Laba :

1. $TAC_{it} = EAT_{it} - OCF_{it}$ (2.4)

2. Menghitung nilai accrual yang diestimasi dengan persamaan *ordinary least regression*

$$TAC_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 \Delta REV + \alpha_3 PPE_{it} + e \quad (2.5)$$

$$\frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} = \alpha_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{REV}{TA_{it-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right) + e \quad (2.6)$$

3. Nilai NDA (nondiscretionary accrual) dari persamaan regresi diatas dengan memasukkan nilai α

$$NDA = \alpha_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV - \Delta REC}{TA_{it-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE}{TA_{it-1}} \right) + e \quad (2.7)$$

4. Menghitung *discretionary accrual*

$$DAC = \frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} - NDA \quad (2.8)$$

Keterangan:

- TAC it : *Total accruals* perusahaan i pada periode t
 EAT it : *Earning after tax* (laba bersih) perusahaan i pada periode t
 OCF it : *Operating Cash Flow* (aruskas bersih) perusahaan i period t
 TAit-1 : *total asset* perusahaan i pada periode t-1
 REVit : *Revenue* perusahaan i pada periode t
 REC it : *Receivable* perusahaan i pada periode t
 PPE it : *Asset tetap (gross property plant and equipment)* perusahaan i tahun t

NDACit : *Nondiscretionary accruals* perusahaan i pada tahun t

DAit : *Discretionary accruals* perusahaan i pada tahun t

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai audit fee telah banyak diteliti sebelumnya dengan hasil yang berbeda-beda. Berikut ini adalah ringkasan beberapa penelitian yang menggunakan *audit fee* sebagai variabel dependen penelitian, antara lain:

1. Devi, Sulistyowati (2014)

Devi, Sulistyowati melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Fee Audit Eksternal (Studi Empiris Pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012)”. Hasil dari penelitian menunjukkan secara simultan Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Intesitas Pertemuan Dewan Komisaris, Independensi Komite Audit, Ukuran Komite Audit, Intensitas Pertemuan Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Fee* Audit Eksternal. Sedangkan secara parsial Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Intesitas Pertemuan Dewan Komisaris, Independensi Komite Audit, Ukuran Komite Audit, dan Intensitas Pertemuan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Fee* Audit Eksternal. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Fee* Audit Eksternal [16].

2. Nadia Rizki Nugrahani, Arifin Sabeni (2013)

Nadia Rizki Nugrahani dan Arifin Sabeni melakukan penelitian dengan judul “Faktor - faktor yang Mempengaruhi Penetapan *Fee* Audit Eksternal pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan internal audit, independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, intensitas pertemuan dewan komisaris, independensi komite audit, ukuran komite audit dan intensitas pertemuan komite audit, auditor karakteristik, ukuran perusahaan, dan anak perusahaan berpengaruh terhadap Audit Fee. Sedangkan secara parsial internal audit, independensi dewan komisaris, jumlah pertemuan dewan komisaris, independensi komite audit dan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit. Ukuran dewan

komisaris, ukuran komite audit, karakteristik auditor, ukuran perusahaan, dan anak perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap *fee* audit [2].

3. Raymond Immanuel (2014)

Raymond Immanuel melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan *Audit Fee* (Studi Empirik Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013)”. Hasil dari penelitian menunjukkan secara simultan Ukuran Perusahaan, Anak Perusahaan, Ukuran KAP, Tipe Kepemilikan Perusahaan, dan Manajemen Laba berpengaruh terhadap *Fee* Audit Eksternal. Sedangkan secara parsial Ukuran Perusahaan, Anak Perusahaan, dan Ukuran KAP berpengaruh terhadap *Fee* Audit Eksternal. Tipe Kepemilikan Perusahaan, dan Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap *Fee* Audit Eksternal [1].

4. Retno Sri Wahyuningsih (2015)

Retno Sri Wahyuningsih melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi *Fee* Audit Eksternal (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013)”. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan internal audit, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, kompleksitas perusahaan, independensi komite audit, Independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap *fee* audit eksternal. Sedangkan secara parsial internal audit, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap audit *fee*. Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap audit *fee*. Independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *fee* audit [17].

Tabel 2.1 Review Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
Devi, Sulistyowati	Pengaruh Komisaris Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Fee</i> Audit Eksternal (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek	Variabel Dependen adalah <i>Audit Fee</i> , sedangkan Variabel Independen adalah Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Intesitas Pertemuan Dewan Komite Audit, Intesitas Pertemuan Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek	Secara simultan : Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Intesitas Pertemuan Dewan Komisaris, Independensi Komite Audit, Ukuran Komite Audit, Intesitas Pertemuan Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Fee</i> Audit Eksternal.

Sambungan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
Indonesia Tahun 2010-2012)		Intensitas Pertemuan Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan.	Secara parsial : Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Intesitas Pertemuan Dewan Komisaris, Independensi Komite Audit, Ukuran Komite Audit, dan Intensitas Pertemuan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Fee</i> Audit Eksternal. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Fee</i> Audit Eksternal.
Nadia Rizki Nugrahani, Arifin Sabeni	Faktor - faktor yang Mempengaruhi Penetapan <i>Fee</i> Audit Eksternal pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI	Variabel Dependen : Audit <i>Fee</i> Variabel Independen : internal audit, independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, intensitas pertemuan dewan komisaris, independensi komite audit, ukuran komite audit dan intensitas pertemuan komite audit , auditor karakteristik, ukuran perusahaan, dan anak perusahaan.	Secara simultan internal audit, independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, intensitas pertemuan dewan komisaris, independensi komite audit, ukuran komite audit dan intensitas pertemuan komite audit , auditor karakteristik, ukuran perusahaan, dan anak perusahaan berpengaruh terhadap Audit <i>Fee</i> . Secara parsial : internal audit, independensi dewan komisaris, jumlah pertemuan dewan komisaris, independensi komite audit dan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>fee</i> audit. Ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, karakteristik auditor, ukuran perusahaan, dan anak perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap <i>fee</i> audit.
Raymond Immanuel	Analisis Faktor- Faktoryang Mempengaruhi Penetapan <i>Audit Fee</i> (Studi Empirik Pada Perusahan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013)	Variabel Dependen adalah Audit <i>Fee</i> , sedangkan Variabel Independen adalah Ukuran Perusahaan, Anak Perusahaan, Ukuran KAP, Tipe Kepemilikan Perusahaan, dan Manajemen Laba.	Secara simultan : Ukuran Perusahaan, Anak Perusahaan, Ukuran KAP, Tipe Kepemilikan Perusahaan, dan Manajemen Laba berpengaruh terhadap <i>Fee</i> Audit. Secara parsial : Ukuran Perusahaan, Anak Perusahaan, dan Ukuran KAP berpengaruh terhadap <i>Fee</i> Audit Eksternal. Tipe Kepemilikan Perusahaan, dan

Sambungan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
Retno Sri Wahyuningsih	Faktor-faktor yang mempengaruhi Audit Eksternal (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013)	Variabel Dependen : Audit Fee Variabel Independen : internal audit, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, kompleksitas perusahaan, independensi komite audit, Independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap fee audit eksternal	Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap <i>Fee</i> Audit Eksternal. Secara simultan internal audit, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, kompleksitas perusahaan, independensi komite audit, Independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap fee audit eksternal. Secara parsial : internal audit, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap audit <i>fee</i> . Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap audit <i>fee</i> . Independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit.

2.3. Kerangka Konseptual



Gambar 2.31 Kerangka Konseptual

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Tipe Kepemilikan Perusahaan terhadap Penetapan Audit Fee

Tipe Kepemilikan Perusahaan digunakan untuk melihat apakah perusahaan tersebut merupakan perusahaan BUMN atau non-BUMN. Apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan BUMN maka audit fee yang dikeluarkan akan rendah dan juga apabila perusahaan non-BUMN maka audit fee yang dikeluarkan akan tinggi. Perusahaan BUMN merupakan perusahaan pemerintah yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari APBN yang kemudian dijadikan modal BUMN. Perusahaan Non-BUMN adalah perusahaan swasta. Perusahaan swasta merupakan pelaku perekonomian Indonesia menunjukkan salah satu ciri ekonomi Pancasila yang tidak menginginkan peranan pemerintah yang terlalu besar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besarnya audit fee yang dikeluarkan oleh perusahaan tergantung dari tipe kepemilikan perusahaan itu sendiri [7].

H₁: Tipe Kepemilikan Perusahaan berpengaruh terhadap Penetapan Audit Fee

2.4.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penetapan Audit Fee

Aset Total dapat menggambarkan ukuran suatu perusahaan. Semakin besar aset biasanya perusahaan tersebut semakin besar. Jadi ukuran perusahaan yang diwakili aset total biasanya mempengaruhi semakin besarnya utang dalam mata uang asing. Dengan demikian apabila ukuran suatu perusahaan tersebut besar, maka audit fee yang dikeluarkan juga akan besar dikarenakan auditor akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Semakin lama auditor memeriksa laporan keuangan, auditor akan meminta fee yang besar pula [9].

H₂: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penetapan Audit Fee

2.4.3. Pengaruh Anak Perusahaan terhadap Penetapan Audit Fee

Sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia, bila ada induk perusahaan mempunyai satu atau lebih anak perusahaan maka diperlukan penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk mengungkapkan secara jelas posisi keuangan dan hasil usaha anak

perusahaan dan induk perusahaan sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, apabila semakin banyak anak perusahaan dalam suatu perusahaan akan meningkatkan audit fee dikarenakan semakin banyak anak perusahaan dalam suatu perusahaan, maka laporan keuangannya juga akan banyak. Untuk itu auditor pasti akan menaikkan fee karena banyak laporan keuangan yang akan diperiksa dan juga akan memakan waktu yang lama untuk memeriksa [11].

H₃: Anak Perusahaan berpengaruh terhadap Penetapan Audit Fee

2.4.4. Pengaruh Ukuran KAP terhadap Penetapan Audit Fee

Empat KAP itu dikenal dengan sebutan *The Big Four Auditors*. Kantor akuntan The Big Four merupakan kantor akuntan internasional terbesar di dunia yaitu : PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, dan KPMG. Ukuran KAP dalam penelitian ini dilihat dari apakah perusahaan tersebut memakai KAP Big Four atau Non-Big Four. Apabila perusahaan menggunakan KAP Big Four maka audit fee juga akan meningkat, dan apabila perusahaan menggunakan Non-Big Four maka audit fee akan menurun [12].

H₄: Ukuran KAP berpengaruh terhadap Penetapan Audit Fee

2.4.5. Pengaruh Internal Auditor terhadap Penetapan Audit Fee

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai. [4]. Audit intern memberikan bantuan besar bagi auditor dalam audit atas laporan keuangan. SA Seksi 322 *Pertimbangan Auditor atas Fungsi Audit Intern dalam Audit atas Laporan Keuangan* memberikan panduan bagi auditor independen dalam mempertimbangkan dan menggunakan pekerjaan auditor intern untuk membantu pelaksanaan audit atas laporan keuangan klien. Dengan adanya Internal Audit dalam perusahaan seharusnya merigankan fee yang akan dikeluarkan oleh perusahaan terhadap Auditor Eksternal [4].

H₅: Internal Auditor berpengaruh terhadap Penetapan Audit Fee

2.4.6. Pengaruh Komite Audit terhadap Penetapan Audit Fee

Komite audit memiliki fungsi dalam hal-hal yang terkait dengan proses dan peran audit bagi perusahaan, terutama dalam pelaporan hasil audit keuangan perusahaan yang dipaparkan untuk publik. Anggota komite audit sekurang-kurangnya tiga orang yang diangkat dan diberhentikan komisaris, sedangkan anggota komite audit dari komisaris bertindak sebagai ketua dan setidaknya satu dari anggota tersebut memiliki keahlian manajemen keuangan dan akuntansi. Keahlian dari Komite Audit akan mengurangi pengujian substantif oleh auditor eksternal sehingga diharapkan dapat memperkecil *fee* audit [5].

H₆: Komite Audit berpengaruh terhadap Penetapan Audit Fee

2.4.7. Pengaruh Kompensasi CEO terhadap Penetapan Audit Fee

Kompensasi adalah imbalan yang diberikan perusahaan kepada individu sebagai balas jasa atas kesediaan mereka untuk melakukan berbagai pekerjaan dan tugas organisasi. Kompensasi yang diberikan terhadap CEO dapat berasal dari bonus, Kompensasi intensif ini pada dasarnya dirancang untuk menyelaraskan manajer dan kepentingan pemegang saham. Bonus diberikan manager dengan insentif untuk melakukan kegiatan mereka dalam cara yang baik, yang mengakibatkan lebih rendah jumlah audit *fee* yang dibayarkan kepada auditor eksternal untuk jasanya. Kompensasi insentif yang dikeluarkan tidak sesuai dalam pengganti upaya audit dalam mendisiplinkan manajemen perusahaan. Oleh karena itu, kompensasi insentif CEO hanya menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham dalam perusahaan tetapi tidak menyebabkan peningkatan atau penurunan biaya audit [18].

H₇: Kompensasi CEO berpengaruh terhadap Penetapan Audit Fee.

2.4.8. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penetapan Audit Fee

Creative accounting atau manajemen laba adalah aktivitas badan usaha untuk memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi guna mendapatkan hasil yang diinginkan. *Creative accounting* cenderung dilakukan oleh pihak manajer untuk mendapatkan hasil

yang diinginkan. Apabila suatu perusahaan menerapkan manajemen laba dalam laporan keuangan perusahaan, pihak auditor akan sulit untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan, sehingga audit fee juga akan meningkat [14].

H₈: Manajemen Laba berpengaruh terhadap Penetapan Audit Fee

